



| | |
|---|-----------------------------------|
| News Title : Bappebti Mempercepat Implementasi SRG untuk Membentuk Tata Niaga yang Efektif | |
| Media Name : beritadaerah.co.id | Journalist : Endah Caratri |
| Publish Date : 22 July 2024 | Tonality : Positive |
| News Page : | News Value : 0 |
| Resources : Novrial (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatra Barat) | Ads Value : 0 |
| Section/Rubrication : Ekonomi | Topic : Resi Gudang |

Home > Ekonomi



Bappebti Mempercepat Implementasi SRG untuk Membentuk Tata Niaga yang Efektif

Endah Caratri Featured July 22, 2024

(Beritadaerah-Jakarta) Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus berupaya mendorong perkembangan Sistem Resi Gudang (SRG). Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengadakan pertemuan teknis SRG untuk mempercepat implementasi SRG dan menciptakan tata niaga produk SRG yang lebih efisien.

Menurut siaran pers Kemendag yang diterima InfoPublik pada Senin (22/7/2024), pertemuan teknis SRG ini dilaksanakan di Padang, Sumatra Barat pada Kamis (18/7/2024).

Melalui pertemuan teknis, kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dapat diidentifikasi. Pertemuan ini juga berfungsi sebagai forum konsultasi untuk mempercepat implementasi SRG, seperti yang disampaikan oleh Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Ahli Utama Bappebti, Nusa Eka.

Harapan dari pertemuan tersebut adalah memberikan solusi dan terobosan dalam penerapan SRG serta membuka peluang bagi pengelola gudang SRG untuk memanfaatkan gudang yang tidak aktif. Peran penting pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan untuk mendukung implementasi SRG di daerah juga ditekankan. Bappebti berharap pengelola gudang SRG dapat mengoptimalkan perannya, tidak hanya sebagai pemelihara komoditas dalam gudang, namun juga meningkatkan fungsi gudang sebagai sarana pembuka akses pembiayaan, peningkatan posisi tawar, dan pemasaran komoditas bagi pasar lokal dan luar negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, SRG merupakan instrumen perdagangan yang bertujuan mendukung kelancaran produksi dan distribusi serta memberikan kesempatan bagi penyimpan/pemilik barang untuk memperoleh alternatif permodalan dari lembaga pembiayaan bank maupun nonbank. Implementasi SRG yang optimal dan berkesinambungan diharapkan dapat menciptakan rantai perdagangan yang lebih efisien melalui transaksi jual beli antara penyimpan/pemilik barang dengan pembeli, baik secara langsung maupun melalui lelang atau daring.

Selama lima tahun terakhir, implementasi SRG menunjukkan peningkatan. Rata-rata transaksi penerbitan resi gudang tercatat sebesar Rp601 miliar, dengan nilai transaksi tertinggi terjadi pada 2022 sebesar Rp1,3 triliun. Pada 2024, penerbitan resi gudang tercatat sebesar Rp1,6 triliun dengan nilai pembiayaan Rp978 miliar.

Minat pelaku usaha terhadap SRG juga semakin meningkat. Hingga saat ini, terdapat 118 pengelola gudang SRG di seluruh Indonesia yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti.

Di Provinsi Sumatra Barat, Bappebti telah memberikan bantuan berupa lima gudang SRG beserta sarana dan prasarana kelengkapan gudang. Dari lima gudang tersebut, tiga di antaranya sudah memiliki pengelola di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Limapuluh Kota. Satu gudang SRG swasta untuk komoditas gambir juga terdapat di Kabupaten Payakumbuh.

Sejak 2009, resi gudang yang diterbitkan di Provinsi Sumatra Barat sebanyak delapan resi gudang untuk 51,29 ton gabah, jagung, dan gambir, dengan total nilai resi gudang sebesar Rp231,36 juta dan pembiayaan sebesar Rp137,9 juta pada 2021.

Komitmen dan peran aktif pemerintah daerah Sumatra Barat serta pihak terkait sangat penting untuk mengoptimalkan implementasi SRG maupun pasar lelang komoditas (PLK). Daerah yang sukses menjalankan implementasi SRG selalu didukung oleh pemerintah setempat melalui dukungan sumber daya manusia, anggaran, jaringan pemasaran, literasi, edukasi, dan kebijakan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatra Barat, Novrial, menyampaikan strategi pengembangan SRG di Sumatra Barat, antara lain dengan mengimplementasikan SRG di gudang-gudang milik pemerintah setempat yang saat ini belum aktif, dukungan anggaran pengembangan gudang untuk memberikan nilai tambah komoditas, peningkatan peran pemerintah daerah dan lembaga pendukung dalam pengembangan SRG, serta pelibatan aktif dunia usaha sebagai motor penggerak. Termasuk dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan untuk semua entitas gudang SRG seperti pelaku usaha, pengelola gudang, aparat, dan lainnya. Selain itu, perluasan akses pembiayaan SRG, identifikasi potensi komoditas unggulan daerah yang dapat disimpan di gudang SRG, serta integrasi SRG dengan pasar lelang komoditas juga menjadi fokus pengembangan.